ANALISIS TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
HARMADA SIBUEA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ari, Karyana, dkk. 2019. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Budiono, Herlien. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fadli, Moh. 2011. *Peraturan Delegasi di Indonesia*, UB Press, Malang.

Fuady, Munir. 2013. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta.

Hardjowahono, Bayu Seto, dkk. 2013. *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak,* BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Hernoko, Agus Yudha. 2013. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.

KemenPuPera. 2017. *Modul 2. Pengetahuan Dasar Kontrak Konstruksi*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.

Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

LKPP. 2018. *Buku Informasi Ketentuan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Modul Pelatihan, LKPP, Jakarta.

_____. 2018. *Buku Informasi-3, Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, LKPP, Jakarta.

_____. 2018. *Buku Informasi Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. LKPP, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Nugroho, Setio Sapto, 2009, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Nurmangkai, Made dan Mahaendra, I Gde, 2017, "*Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*," FH Universitas Udayana, Modul Perkuliahan, tanpa penerbit.

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Salim, HS., dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____. dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Simamora, Y. Sogar. 2017. *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Surabaya.

Soekamto, Soedikno. 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

_____ dan Mamudji, Sri. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*: *Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Soeprapto, Maria Farida Indrati., dkk, 2008, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta

_____, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

Suharno, dkk., 2018, *Panduan Teknis Kuasa Pengguna Anggaran*, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

_____. 2014. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Subekti I, R. 2012. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa. Cetakan 10, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. CV. Mandar Maju, Bandung.

.

JURNAL

Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi & Keuangan* Vol. 20 No. 2 (Agustus 2016).

Fitriani Ahlan Sjarif. "Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia", *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Hanim MS, Lathifah. Noorman. 2016. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, No. 2.

Indrarti, Maria Farida, 2007, "Meningkatkan kualitas Peraturan perundang-undangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No 2. Juni 2007.

Sjaiful, Muhammad. 2015. Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.15, No.1.

Khairandy, Ridwan. 2011. Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak, *Jurnal Hukum* No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011.

Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan, Pusat Pengkajian Dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional*, Jakarta (tanpa tahun)

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS TERHADAP KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT
HARMADA SIBUEA, Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ARTIKEL/ MATERI PRESENTASI

Faisal. 2020. "Audit Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19", BPKP. Jakarta.

Susantosa, Patria. 2020. "*Solusi Permasalahan Kontrak PBJP di Era Pandemi*", LKPP. Jakarta.

Transparency International Indonesia, 2021, *Implikasi Pergeseran Kewenangan Dalam Kebijakan Anggaran Penanganan Covid 19*, Paper, Transparency International Indonesia, Jakarta.

LAPORAN

Maria Farida, dkk, 2008, "*Laporan Kompedium Bidang Perundang-undangan",* Departemen Hukum dan HAM RI.

INTERNET

Mahendra, AA. Oka. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,* http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses tanggal 11 November 2019

https://ekbis.sindonews.com/berita/1455580/33/anggaran-pengadaan-barang-dan-jasa-capai-52-apbn diakses pada tanggal 21 Desember 2021,

https://kbbi.web.id/darurat, diakses pada Oktober 2021

https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-pada-2021-mencapai-rp-1214-triliun, diakses pada tanggal 21 Desember 2021

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174, diakses pada 14 November 2021

http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/3, diakses pada 21 Desember 2021

https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-masuk-daftar-35-negara-paling-rawan-bencana-di-dunia/5801062.html, diakses 1 Oktober 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemt Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19.